

Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa

Nurfadhilah Itsnaini Djahmiq & Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: nurfadhilah.itsnaini@yahoo.com, salahudinmsi@umm.ac.id

Dikirimkan: 23 Januari 2022

Direvisi: 29 Maret 2022

Diterbitkan: 31 Maret 2022

INTISARI

Pembangunan desa adalah konteks masa kini yang merujuk pada kemandirian sebuah kelompok masyarakat. Kemandirian masyarakat dipandang sebagai sebuah keadaan yang tercipta dari adanya sikap kolektif masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku tersebut dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah yang memberikan syarat adanya gerakan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi terus dijalankan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat desa yang ada di negara Indonesia. Masyarakat desa menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan yang ada, untuk dapat memberikan dampak yang baik bagi di setiap penjurus desa di Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat merupakan partner terbaik dalam pembangunan yang ada maka dengan itu pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pembangunan.

KATA KUNCI

Pembangunan Desa, SDGs

Pendahuluan

Pembangunan desa adalah konteks masa kini yang merujuk pada kemandirian sebuah kelompok masyarakat. Pembangunan desa termuat di dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab IV pasal 18 yang berbunyi “Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa” (UUD No.06 Tahun 2014, 2014). Pembangunan desa yang sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki dapat dijadikan sebagai ikon bagi desa tersebut oleh karena itu, pembangunan potensi unggulan yang dimiliki oleh suatu desa dapat berbeda dengan desa yang lainnya hal ini dikarenakan setiap desa memiliki keanekaragaman yang khas baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan geografis (Ulfah et al., 2017). Kemandirian masyarakat dipandang sebagai sebuah keadaan yang

tercipta dari adanya sikap kolektif masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku tersebut dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah yang memberikan syarat adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan dengan cara menciptakan peluang wirausaha sesuai dengan minat para pemuda dan melihat potensi daerah.

Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak terlepas dari kaum pemuda desa. Pemuda merupakan salah satu elemen masyarakat yang memiliki peluang dalam membangun kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, masyarakat mempunyai posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas dan inovasi tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan.

Pengembangan kewirausahaan di desa menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju *innovation driven economy* sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 (tiga) hal yaitu:

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumber daya alam (SDA), geografis wilayah dan sumber daya manusia (SDM) melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan.

Karena itu, kajian ini hadir untuk mengisi diskusi tentang Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa agar mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat maupun negara Indonesia.

A. Inovasi

Inovasi merupakan sebuah gagasan yang muncul dan belum pernah ada sebelumnya. Dengan adanya inovasi, diharapkan dapat menjadi sebuah hal yang bermanfaat dan menarik para penggunanya. Setiap individu yang melakukan inovasi disebut dengan seseorang yang inovatif atau inovator. Di era perkembangan teknologi saat ini, para pelaku usaha dituntut untuk dapat terus berinovasi dan menghadirkan hal-hal baru yang dapat menarik daya keinginan seseorang untuk melakukan perilaku konsumtif dan guna mempertahankan keberlangsungan hidup usaha bagi para pelaku usaha. Apabila seorang pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi maka para pelanggannya akan memilih untuk mencari pelaku usaha lainnya yang memiliki inovasi produk yang lebih menarik. Masyarakat saat ini cenderung lebih mudah bosan

apabila tidak terdapat pembaruan dari suatu produk. Persaingan di dunia bisnis saat ini terlihat sangat ketat. Dimana para pelaku usaha terus bersaing dalam hal harga, kualitas dan segala hal yang penting dalam menghasilkan sebuah produk. Sebuah hal yang dikatakan inovatif tidak terlahir dari suatu hal yang baru namun, memiliki manfaat tersendiri bagi inovator maupun penggunanya. Inovator dituntut untuk berani mengambil risiko dalam seluruh keputusan yang diambil. Mereka cenderung harus memiliki sikap yang tenang dalam menghadapi masa-masa sulit sekalipun guna menciptakan suatu hal yang baru dengan hasil buah pola pikirnya.

Dalam berinovasi, para pelaku usaha harus mampu fokus pada tiga perihal yang meliputi gagasan baru yang merupakan hasil olah pikir dari pengamatan atas sebuah fenomena yang sedang terjadi. Kedua adalah produk maupun jasa yang ditawarkan merupakan langkah lanjutan dari gagasan baru yang ditindak lanjuti dari beberapa kajian penelitian dan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang dikembangkan. Ketiga adalah upaya dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan, guna menghasilkan sebuah inovasi yang memiliki manfaat. Dapat dikatakan sebagai inovasi baru apabila mempunyai ciri khas tersendiri dari gagasan yang diberikan, mempunyai unsur kebaruan atau buah pikir yang mempunyai kadar orisinalitas dan kebaruan, program inovasi yang dilakukan karena adanya program terencana pada suatu inovasi dan inovasi yang bertujuan atau memiliki sasaran yang ingin dicapai.

B. Pembangunan Desa

Banyak pendekatan pembangunan yang telah diterapkan, yakni dari pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan dasar hingga yang paling mutakhir yakni pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral (objek sekaligus subjek) pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik, bukan pada pembangunan karakter masyarakat. Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang relevan adalah masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, terdesentralisasi dan tepat sasaran.

Konsep pembangunan yang berpusat manusia memandang inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan pembangunan. Visi ini menjadikan pembangunan dianggap sebagai gerakan rakyat daripada hanya sekedar sebagai proyek pemerintah. Visi pembangunan yang mengutamakan manusia sangat relevan karena adanya pergeseran peranan pemerintah dalam konteks pembangunan, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sejak perencanaan hingga implementasi dan pemanfaatannya, peranan masyarakat yang menonjol. Peran itu lebih efektif apabila masyarakat juga berperan dalam penggunaan alokasi anggaran.

Pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya

menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Tujuan pembangunan guna untuk meningkatkan sektor bidang di setiap daerah atau wilayah yang ada di negara Indonesia dengan kata lain pembangunan menjadi cara untuk dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang baik bagi negara Indonesia. Manfaat dalam pembangunan inovasi desa untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan SDM dan mutu daerah agar dapat menjadikan negara Indonesia memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan.

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Pembangunan desa menjadi salah satu cara untuk dapat terus meningkatkan desa dalam semua sektor bidang yang menjadi fokus utama di setiap desa terutama pada sektor bidang ekonomi banyaknya desa-desa yang berusaha untuk meningkatkan pembangunan untuk menghasilkan desa yang maju namun adanya kendala-kendala yang timbul pada pembangunan desa yang menjadi hambatan bagi desa untuk terus berkembang. Pembangunan potensi lokal berbasis agrowisata memberikan dampak positif bagi petani, masyarakat desa, dan pemerintah desa, akan tetapi di sisi lain karena pembangunan potensi ini mengandalkan SDA, pengembangannya juga sangat tergantung dengan alam (Ulfah et al., 2017). Dari salah satu contoh pembangunan desa yang ada pada agrowisata yang dimana kendala utamanya adalah cuaca yang terkadang tidak menentu sehingga mampu membuat hambatan bagi pembangunan desa dan masih banyak lagi hambatan-hambatan yang ada sehingga mampu membuat pembangunan desa menjadi terbengkalai atau terhambat.

C. SDGs

Kemiskinan di negara Indonesia sendiri masih terbilang berat atau tinggi sehingga dapat dikatakan masyarakat yang masih ada pada golongan miskin masih dapat dijumpai dengan baik di setiap sudut wilayah atau daerah di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang bergabung sebagai anggota PBB yang dimana menerapkan banyak strategi untuk memberantas kemiskinan yang ada di setiap negara termasuk negara Indonesia. Adanya program yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan di setiap negara yang biasanya disebut dengan SDGs yang dimana sebelumnya adanya program MDGs yang menjadi pengentas kemiskinan.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan dan sasaran SDGs terintegrasi dan menyeluruh, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas nasional yang berbeda-beda kapasitas dan tingkat pembangunannya serta menghormati setiap kebijakan dan prioritas nasional setiap negara. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam melakukan pendekatan dan menyusun strategi yang menyeluruh antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan karakteristik dan prioritas nasional. Pada Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan (Ishatono & Raharjo, 2016) terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari MDGs, yakni :

1. SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
2. Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
3. MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.
4. SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk anti diskriminasi.
5. Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
6. PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs.
7. *Conference of the Parties 21* (COP21) di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.

SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030. SDGs meliputi masalah-masalah pembangunan yang menyeluruh dan menargetkan penyelesaian yang tuntas dari setiap tujuan dan sasaran yang ada. Hal ini menjadikannya bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada setiap

negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran SDGs harus memberikan manfaat bagi semua, *no one left behind* Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati SDGs sangat berkomitmen untuk melaksanakan dan menyukseskannya. Untuk itu, pada tahun 2016 telah dilakukan beberapa langkah strategis, yakni memetakan tujuan dan sasaran SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, memetakan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap tujuan dan sasaran SDGs, menyusun definisi operasional setiap indikator SDGs, menyusun peraturan presiden (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dan mempersiapkan rencana aksi daerah dan nasional berkaitan dengan penerapan SDGs.

Sebagian besar tujuan dan sasaran SDGs telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sebanyak 57%, yakni 96 dari 169 sasaran SDGs sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Salah satu pilar SDGs, yakni lingkungan diakomodasi dalam tujuan ke-6 serta tujuan ke-11 hingga 15 berturut-turut adalah akses air bersih dan sanitasi, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, serta menjaga ekosistem darat. Pilar lingkungan ini diakomodasi dalam RPJMN, yakni ketahanan air, membangun perumahan dan kawasan permukiman, penanganan perubahan iklim dan kebencanaan dengan rencana aksi nasional pengurangan emisi GRK, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) dan pengelolaan bencana, serta rencana aksi dan strategi keanekaragaman hayati.

Berkaitan dengan tujuan ke-13 SDGs, yakni tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, Indonesia telah mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Hal ini diwujudkan dalam bentuk dokumen biennial update report (BUR) yang berisi pemutakhiran data inventarisasi GRK nasional sebagai bentuk kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta capaian penanganan perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional. Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK juga disusun sebagai wujud tindakan nyata berdasarkan rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK pada sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian dimana data yang terkumpul dan analisis yang dilakukannya memiliki sifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan adalah model interaktif dengan adanya tiga tahapan yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang terkait. Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan analisa dari jurnal-jurnal yang membahas tentang topik Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa.

Analisis data menggunakan NVivo 12 plus yang dimana NVivo 12 plus merupakan *software* analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan membuat

visualisasi data teks seperti data website dan dokumen. Tahap analisis data dengan mengumpulkan dokumen yang berasal dari website yang dimana dengan begitu dapat dikelola melalui NVivo 12 plus. Dokumen-dokumen yang di analisis diklasifikasi sesuai dengan arah yang sesuai dengan penelitian Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa.

Pembahasan

A. Strategi Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Inovasi Desa.

Clausewitz yang dikutip Yunus (2016) mengartikan strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan, strategi terdiri dari beberapa aktivitas penting yang perlu untuk mencapai sebuah tujuan (Zakiyah & Idrus, 2017). Strategi meningkatkan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa yang dimana mendorong untuk dapat terus menciptakan desa yang baik dan sejahtera untuk masyarakat desa. Adanya strategi yang dilalui untuk sampai pada tujuan pengembangan desa yang dimana dengan memperbaiki jalan-jalan yang mengganggu aktifitas masyarakat desa, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk masyarakat desa, dan lain-lainnya. Banyaknya strategi untuk dapat meningkatkan mutu setiap desa di Indonesia karena pada dasarnya masyarakat desa merupakan masyarakat yang paling banyak berpengaruh pada negara Indonesia.

Strategi terus dijalankan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat desa yang ada di negara Indonesia. Masyarakat desa menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan yang ada, untuk dapat memberikan dampak yang baik bagi di setiap penjuru desa di Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat merupakan partner terbaik dalam pembangunan yang ada maka dengan itu pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pembangunan.

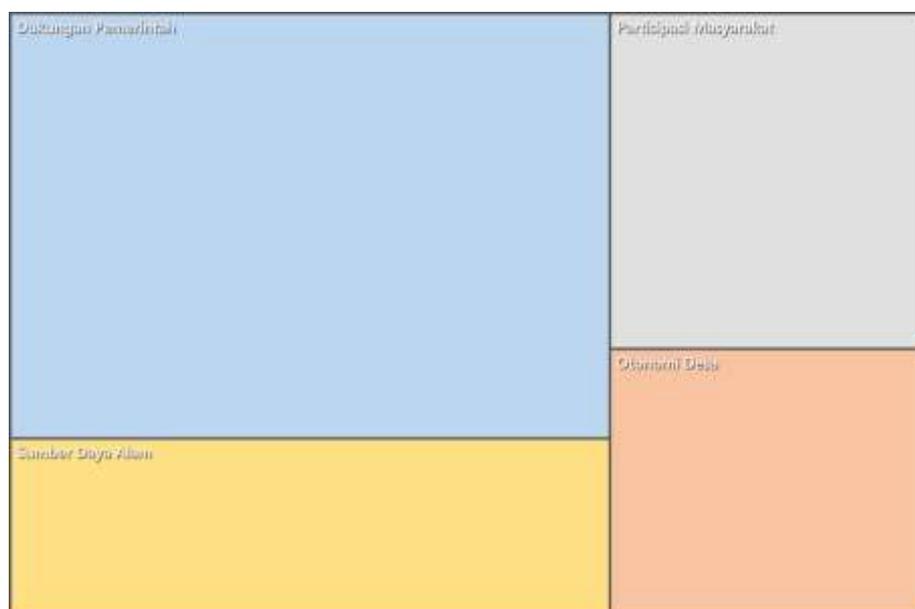
Strategi dalam meningkatkan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa menjadi peluang untuk masyarakat desa agar lebih dapat mengasah kemampuan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tingkat desa agar mampu melahirkan manusia-manusia yang berpotensi dalam mengambangkan serta mengelola desa. Dengan adanya pembangunan desa yang menjadikan setiap desa memiliki kesempatan untuk dapat lebih memahami potensi-potensi serta hal-hal yang perlu dikembangkan pada desa-desa yang ada di Indonesia. Peluang untuk meningkatkan desa-desa yang ada akan memberikan dampak yang besar bagi negara dalam mewujudkan kemakmuran negara karena pada dasarnya bila strategi pembangunan desa dapat berjalan lancar akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan hidupnya serta lingkungannya.

B. Potensi Pembangunan

Potensi pembangunan menjadi ukuran seberapa besar kualitas serta hasil yang akan didapat dalam menjalankan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa karena dapat dikatakan potensi menjadi faktor pendorong untuk dapat menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan selalu menjadi hal yang diutamakan untuk menjadikan setiap daerah yang ada di Indonesia menjadi daerah yang bermutu, berkualitas, dan dapat meningkatkan setiap perekonomian di daerah.

Potensi-potensi yang mendorong atau mendukung pembangunan yang ada memudahkan jalan bagi setiap pemerintah serta masyarakat dalam melakukan setiap pembangunan, di desa banyak sekali potensi yang dapat memudahkan masyarakat desa untuk dapat memajukan desanya dengan bantuan pemerintah dalam pembangunan desa yang dimana menjadikan desa meningkat dalam beberapa sektor bidang.

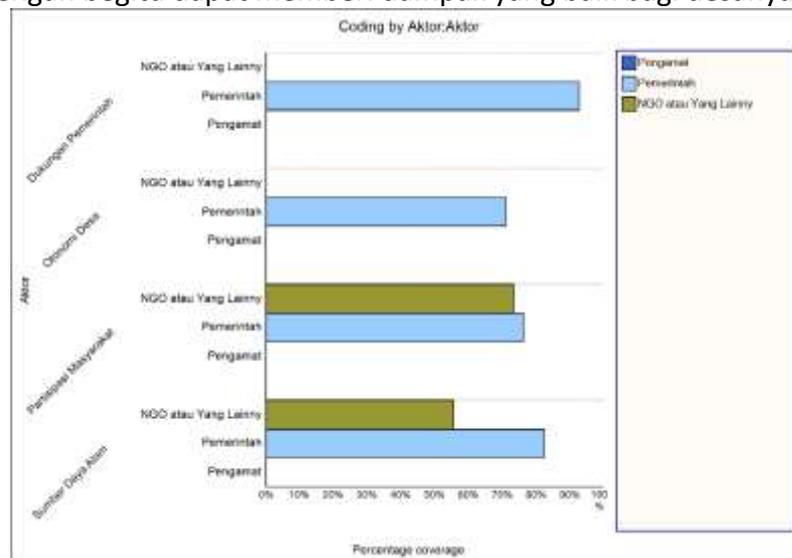
Potensi pembangunan memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk dapat mengembangkan sektor bidang yang ada untuk dapat menjadi lebih terarah dan terjamin yang dimana dengan adanya potensi yang dapat digunakan dengan baik namun tetap dengan penggunaan yang sesuai pada peraturan yang berlaku. Potensi yang ada menjadi manfaat yang baik dalam pembangunan karena dapat mengurangi beban perekonomian serta yang lainnya terutama pada masyarakat miskin maka dengan itu potensi-potensi yang ada dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk menghasilkan mutu yang berguna pada setiap sektor bidang yang ada serta pada masyarakat dan wilayah atau daerah itu sendiri.



Dukungan pemerintah merupakan faktor pendorong untuk dapat potensi-potensi yang ada untuk mendukung pembangunan desa, hal itu menjadi hal yang baik bagi masyarakat karena dengan dukungan pemerintah yang besar menjadikan pembangunan desa yang berkualitas. Pada akhirnya bila partisipasi masyarakat tidak besar dalam pembangunan maka hanya menimbulkan rasa percuma karena itu sama saja membuang semua SDA yang menjadi potensi dengan cara percuma maka dengan itu partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu pembangunan desa agar menghasilkan tujuan dari pembangunan serta menjadikan SDA yang terpakai pada pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat desa sendiri di negara Indonesia adanya potensi energi terbarukan yang menurut banyaknya data ada sebanyak 300.000 mega watt, namun hanya digunakan sebanyak 3% padahal potensi energi itu sangat dekat dengan desa-desa yang ada di Indonesia sehingga mampu menciptakan potensi inovasi energi bagi setiap desa. Otonomi daerah menjadi hal yang penting dalam pembangunan desa karena tanpa adanya aturan desa maka pembangunan akan

terkesan percuma serta pembangunan harus dilakukan berdasarkan aspek peraturan di desa itu sendiri yang dimana pada dasarnya kebutuhan di setiap desa hanya diketahui oleh desa itu sendiri sayangnya pada bagian otonomi desa masih belum menjadi pedoman yang kuat untuk menciptakan inovasi desa.

Dukungan pemerintah dapat dikatakan sudah stabil dalam mendorong masyarakat maupun pihak lain yang berwenang untuk dapat meningkatkan pembangunan di desa-desa yang ada di Indonesia namun SDA dan otonomi daerah masih belum menjadi landasan atau acuan untuk dapat membangun desa menjadi lebih baik. Masih kurangnya pemahaman akan peraturan yang terkait pembangunan desa menjadikan kinerja dalam pembangunan selalu mengalami kendala dalam prosesnya seperti pembangunan yang masih menentang peraturan yang ada sehingga adanya masalah di antara pemerintah dengan masyarakat terutama dalam pengelolaan SDA bagi pembangunan masih rawan atau sering menjadi permasalahan utama dalam setiap pembangunan desa-desa yang ada di Indonesia. Peraturan Desa dalam perundang-undangan, baik jenis dan hirarkinya, akan menentukan maju mundurnya desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang di atasnya (Roza, 2017). Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Otonomi daerah berperan penting dalam pembangunan desa karena dapat menentukan maju atau mundurnya dampak dari pembangunan desa kepada pemerintah pusat. Dalam pembangunan inovasi desa ini juga memerlukan kerja sama pada pihak masyarakat sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses pembangunan desa karena pada dasarnya yang mengenal desa itu sendiri ialah masyarakat desa yang berada pada lingkungan desa. Pada konteks pembangunan partisipasi masyarakat memiliki manfaat, Pariatra Westra dalam Astuti (2008) menjelaskan manfaat partisipasi yaitu lebih mengedepankan didaptkannya keputusan yang sesuai, bisa dipakai sebagai keahlian berpikir kreatif dari para pengikutnya, bisa mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta menumbuhkan kepentingan bersama, sebagai peningkatan rasa seseorang dalam bertanggung jawab, dan mengedepankan kemajuan untuk mengikuti perubahan (Hadawiya et al., 2021). Dengan adanya partisipasi masyarakat akan mampu membuat masyarakat lebih sadar dan dapat mengikuti arus perubahan yang semakin berkembang maju sehingga dengan begitu dapat memberi dampak yang baik bagi desanya.



Aktor yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi desa ialah pemerintah, pengamat, NGO (organisasi masyarakat) yang dimana ketiga aktor merupakan yang paling dekat dan berpengaruh dalam pembangunan desa. Pemerintah selalu memberikan dukungan 100% dalam pembangunan desa karena pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat memberikan kesempatan bagi setiap desa untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas suatu desa, dukungan yang diberikan pemerintah seperti adanya otonomi desa yang dimana untuk melakukan pembangunan yang dibutuhkan pada setiap desa. Pemerintah juga mendukung setiap peran dan hasil yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang merupakan potensi pada desa maka dengan itu pemerintah dengan memberikan bantuan anggaran untuk dapat mengelola SDA yang ada menjadi bermanfaat bagi setiap masyarakat desa. Kemudian, pemerintah desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat (Mondong, 2013), penjelasannya sebagai berikut:

1. Sebagai dinamisator, tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
2. Sebagai katalisator, ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
3. Sebagai Pelopor, sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

Pemerintah menjadi salah satu aktor yang penting dalam proses pembangunan desa karena pada kenyataannya pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mendorong masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya kerja sama pemerintah dengan masyarakat akan mampu meningkatkan pembangunan desa sehingga pemerintah dan masyarakat dapat merasakan dampak baik dari pembangunan desa.

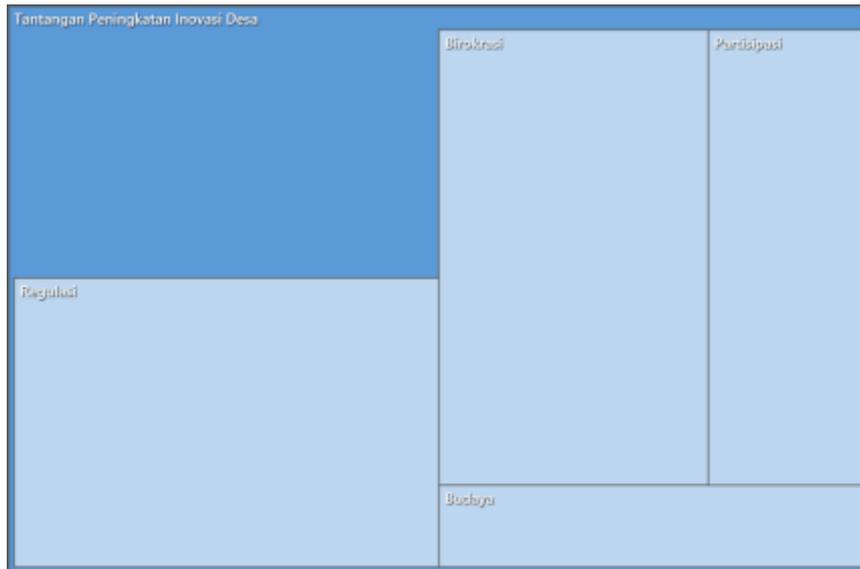
Pengamat dalam menjalankan perannya sangat kurang baik karena pada tahap pembangunan infrastruktur dan inovasi desa pengamat belum menjalankan tugasnya dengan baik. NGO berperan sedikit lebih aktif ketimbang dari pengamat yang dimana dapat dilihat bahwa dalam partisipasi masyarakat NGO mendukung setiap usaha dan hasil dari kerja masyarakat serta NGO juga membantu masyarakat untuk mengelola SDA untuk dapat mendukung pembangunan seperti hutan-hutan yang ada di desa dilestarikan serta dibangun tempat untuk dapat menikmati pemandangan hutan tanpa merusak hutan tersebut dan adanya bantuan promosi-promosi dan dukungan menjaga alam dan hutan yang berasal dari pihak NGO. Dalam proses pembangunan sebuah negara, LSM/NGO memainkan tiga jenis peranan yang sangat penting yaitu: (1) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat "*grassroots*", yang sangat

Sumber daya alam merupakan potensi desa yang dimana dapat dikelola untuk dapat memberikan peningkatan bersama bagi masyarakat desa namun dalam penggunaannya masih harus dalam batas peraturan yang berlaku. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa (Soleh, 2017). Dengan adanya potensi desa yang menjadikan dorongan bagi pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat program pembangunan yang sedang berjalan di setiap desa-desa yang ada di Indonesia.

C. Tantangan Pengembangan

Tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi desa pasti adanya karena adanya hal-hal yang menjadikan pembangunan desa mengalami kendala. Namun pada dasarnya tantangan atau kendala yang muncul menjadikan adanya peningkatan dalam kualitas pengembangan desa tersebut karena dengan adanya tantangan menjadi evaluasi pemerintah dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang ada untuk mewujudkan pembangunan desa bagi masyarakat. Tantangan pembangunan di desa adanya beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan, adanya rasa dilema dalam menggunakan SDA yang ada di desa, dan lain-lainnya. Pada tahun 2020 pengembangan desa menurun drastis karena adanya covid-19 sehingga anggaran yang ada untuk pembangunan digunakan untuk menurunkan angka terjangkit covid-19.

Tantangan berikutnya dalam program inovasi desa adalah masih fokusnya pemerintah desa pada pembangunan infrastruktur. Selain memang kebutuhan akan pembangunan tersebut masih cukup besar juga karena anggapan bahwa pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun demikian, kedepannya diperlukan penguatan yang seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik (Henriyani, 2019). Tantangan yang ada dalam pembangunan desa tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya pembangunan desa merupakan gabungan kebutuhan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga permasalahan-permasalahan yang ada akan selalu terkait antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dengan adanya tantangan menjadikan acuan bagi pembangunan desa agar lebih waspada akan permasalahan-permasalahan yang akan datang serta tantangan juga dapat menjadikan pelajaran bagi aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan desa untuk lebih mengurangi resiko timbulnya kendala yang ada.

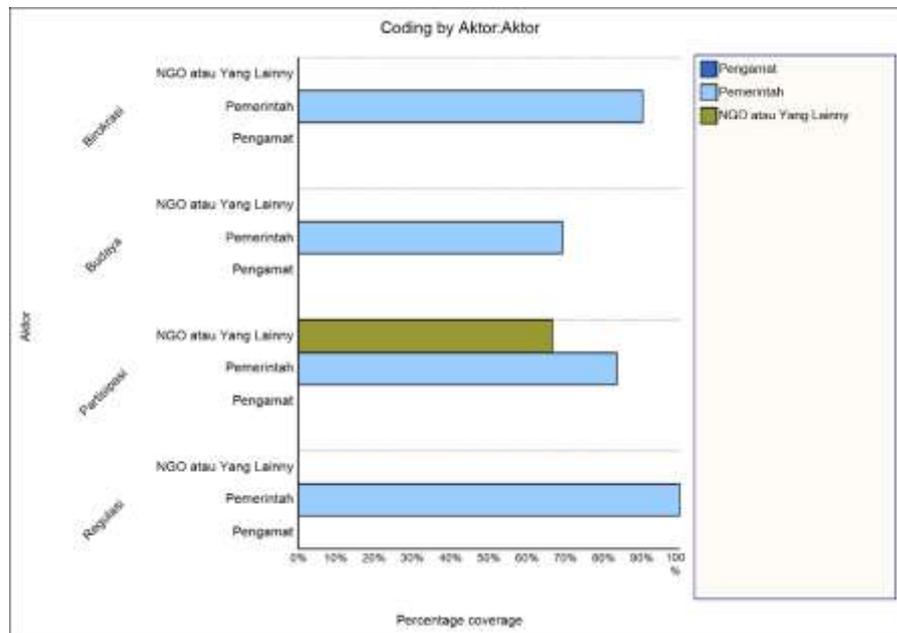


Tantangan peningkatan inovasi desa yang menjadikan tantangan lebih mudah teratasi ialah regulasi namun pada akhirnya terkadang regulasi menjadikan kendala itu sendiri karena berlawanan antara apa yang diinginkan dengan peraturan yang ada namun pembangunan desa harus dengan regulasi yang ada. Regulasi menjadi acuan bagi para aktor dalam pembangunan desa untuk tidak keluar dari yang seharusnya atau menyalahgunakan wewenang dalam pembangunan desa namun, regulasi sendiri sering menjadi pedang pertama dua yang dimana terkadang menjadi kendala dalam pembangunan desa itu sendiri. Regulasi sering menjadi permasalahan yang dirasakan pada masyarakat desa karena kebutuhan masyarakat sering tertahan dengan adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah sehingga timbulnya kendala atau permasalahan dari regulasi yang ada.

Birokrasi berusaha untuk tidak adanya kendala yang muncul dalam pembangunan desa karena pihak birokrasi akan kesulitan dalam menangani kendala yang ada pada pembangunan terlebih bila tantangan itu berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Birokrasi sebagai sarana untuk mencegah adanya kendala namun tidak dapat dipungkiri birokrasi masih sering menjadi alasan kendala itu muncul terutama bila birokrasi berhadapan dengan masyarakat. Bedanya kepentingan antara birokrasi dan masyarakat menjadikan timbulnya hambatan pada hambatan pembangunan inovasi desa sehingga dengan begitu membuat birokrasi dan masyarakat dapat membuat pembangunan gagal atau berjalan tidak baik.

Partisipasi merupakan hal yang paling mudah menimbulkannya konflik sehingga perlunya kewaspadaan yang tinggi pada partisipasi merupakan tantangan dalam pembangunan desa, namun dari budaya tantangan yang ada tidak terlalu merepotkan karena itu tidak terlalu sering membuat pembangunan desa mengalami kendala. Partisipasi yang cenderung menjadi hambatan adalah masyarakat yang dimana masih adanya masyarakat yang tidak ingin adanya pembangunan desa yang dimana alasannya masih tidak jelas. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sering membuat proses pengembangan inovasi menjadi tidak berjalan dengan semestinya karena peran partisipasi masyarakat diharapkan dapat bekerja sama atau berperan aktif untuk

menjalankan program pengembangan inovasi desa agar mampu membuat dampak baik bagi desa maupun masyarakat itu sendiri.

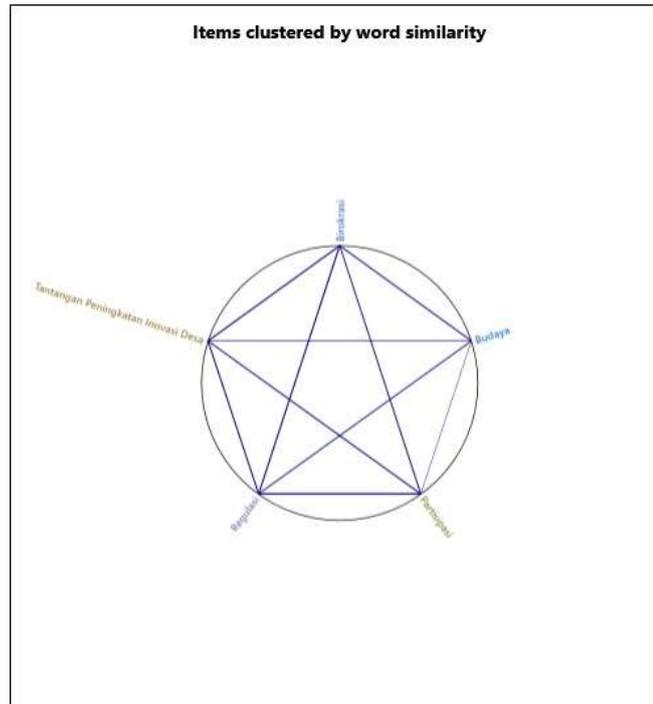


Aktor yang berperan dalam tantangan pembangunan ini lebih banyaknya adalah pemerintah yang dimana setiap tantangan yang berasal dari pihak pemerintah akan terselesaikan karena pemerintah menyelesaikan kendala untuk terus mendukung pembangunan desa serta tantangan bagi birokrasi untuk terus menjalankan proses pembangunan yaitu menekan kendala yang bermunculan agar pembangunan desa berjalan dengan baik. Pada regulasi pemerintah berusaha untuk menyesuaikan jawaban dari kendala dengan sesuai dengan regulasi yang ada namun, tidak hanya itu pemerintah juga membuat regulasi yang mendukung pembangunan itu tetap berjalan tanpa tantangan atau kendala serta dalam budaya pemerintah mencoba mengikuti arus budaya yang berada di setiap desa untuk menghindari kendala yang ada. Pemerintah berperan penting dalam penanggulangan atau pencegahan permasalahan yang ada namun seringkali pemerintah menjadi kendala itu sendiri sehingga pembangunan inovasi desa menjadi tersendat, pemerintah selalu diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan baik dan jujur apalagi pemerintah merupakan pembuat kebijakan atas pelayanan masyarakat itu sendiri tetapi bila pemerintah menjadi kendalanya akan membuat masyarakat menjadi lebih mengurangi rasa percayanya terhadap pemerintah.

Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten, menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan Pemerintah desa terhadap upaya Pembangunan desa hal ini dapat dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan daerah kabupaten minahasa yang mengatur khusus tentang pelaksanaan pembangunan di desa yang acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Pangkey, 2016). Permasalahan yang timbul dari birokrasi dan regulasi adalah ketidakjelasan yang membuat pemerintah menjadi terikat karena pada dasarnya kebijakan dan peraturan semua berasal dari pemerintah tetapi tidak dapat dipungkiri pemerintah berusaha untuk memperbaiki permasalahan yang

ada. Namun permasalahan yang ada timbul dengan cara yang sama dan sering terjadi maka dengan itu tantangan yang ada pada pemerintah terkadang berasal dari pihak pemerintah itu sendiri terkesan aneh namun itu memang sering terjadi. Dengan partisipasi NGO dan pemerintah berusaha untuk bekerja sama untuk mengurangi kendala-kendala yang ada selama pembangunan desa, partisipasi menjadi hal yang mudah dalam timbulnya konflik atau kendala maka dengan itu menjadi tantangan pemerintah untuk dapat mengurangi kejadian itu terjadi dalam proses pembangunan desa. NGO berperan sedikit untuk memperbaiki permasalahan atau mengurangi resiko terjadinya kendala namun peran yang dilaksanakan NGO tidak berjalan sepenuhnya yang dimana partisipasi NGO sebagai aktor masih sangat kurang bagi pembangunan desa apalagi dalam penanggulangan permasalahan yang timbul di dalam program pembangunan inovasi desa.

NGO atau LSM dan pemerintah memiliki keunggulan komparatif dalam aktivitas pembangunan, kolaborasi keduanya atas dasar keunggulan komparatif sering dirumuskan melalui perspektif fungsional yakni dengan asumsi bahwa keduanya saling melengkapi kekuatan fungsional masing-masing tetapi dalam praktiknya, pendekatan seperti ini tidak selalu berjalan sesuai harapan (ARIANTO, 2017). Permasalahan yang timbul bukan hanya pada masyarakat namun antar aktor seperti NGO dan pemerintah mungkin saja terjadi dalam pembangunan desa karena adanya kepentingan yang berbeda dalam setiap kelompok kepentingan. Permasalahan yang timbul di antara pemerintah dan NGO adalah tentang kekuasaan yang dimana kedua belah pihak selalu ingin lebih vokal dalam menyampaikan sehingga permasalahan akan selalu muncul dalam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut yang dimana menjadikan pembangunan desa menjadi kurang berjalan bahkan tersendat sepenuhnya. Kendala-kendala yang muncul diantara aktor menjadikan setiap pengamat pembangunan menyadari bahwa setiap yang berhubungan dengan dua belah pihak perlu berjalan dengan hati-hati serta harus saling memahami untuk dapat menghasilkan pembangunan desa yang bermanfaat bagi setiap pihak. Aktor-aktor dalam pembangunan diharapkan dapat menjalankan hak dan wewenangnya dengan sesuai dengan kebutuhan pembangunan itu namun kendala itu sering muncul dari mereka sendiri yang dimana itu menjadi bumerang, pada dasarnya mereka adalah para penggiat yang harus melepaskan atau mencegah adanya kendala yang muncul dalam pembangunan inovasi desa tetapi mereka masih sering menjadi kendala itu sendiri sehingga pembangunan yang ada menjadi terkesan setengah hati yang dimana prosesnya masih sering terkendala.



Korelasi antara birokrasi dan partisipasi dapat dikatakan kuat karena untuk mencegah adanya kendala yang ada pada pembangunan desa seperti korelasi antara birokrasi dan regulasi yang dimana merupakan cara untuk menekan adanya tantangan yang muncul pada proses pembangunan desa. Hubungan antara birokrasi dan partisipasi diharapkan baik untuk dapat mencegah adanya kendala yang muncul dari kedua belah pihak karena pada dasarnya konflik yang sering muncul selalu di antara birokrasi dan partisipasi yang dimana itu adalah masyarakat. Birokrasi dan partisipasi masyarakat selalu memiliki kepentingan mereka sendiri dalam kebutuhan yang ada pada pembangunan desa sehingga itu menjadi bumerang di antara mereka dan menjadikan permasalahan sering timbul di antara mereka.

Korelasi antara budaya dan partisipasi sangat tidak kuat karena adanya faktor yang menjadikan partisipasi yang tidak menggenggam budaya tidak erat karena pada dasarnya pembangunan ini terjadi untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru dengan lebih mudah dan praktis sehingga budaya yang sudah tertanam lama akan memudar seiringnya waktu. Hal itu menjadi tantangan pemerintah untuk tidak membuat masyarakat melupakan kebudayaan dan tetap merasakan kebiasaan yang baru. Dengan adanya perubahan budaya itu menjadikan masyarakat yang masih menganut sistem lama menjadi sulit untuk mengubah pandangan mereka ke arah sistem yang lebih modern. Namun, budaya pada partisipan akan selalu melekat karena pada kenyataannya budaya sudah menjadi identitas serta kebiasaan pada setiap partisipan yang dimana budaya itu sudah menjadi lingkungan bagi setiap partisipan sehingga bila hubungan antara budaya dan partisipan tidak dapat dipisahkan karena itu sudah melekat.

Korelasi pada regulasi dan partisipan dapat dikatakan sangat kuat karena dapat dilihat dari skala korelasi yang ada dengan jumlah sebanyak 0,57 untuk mencegah tantangan meningkat maka partisipan dalam pembangunan desa harus memahami

regulasi yang ada untuk dapat mencegahnya kendala yang muncul dalam pembangunan desa. Hubungan antara regulasi dan partisipan masih menjadi bumerang bila itu mengarah pada setiap pemicu kendala itu kedua belah pihak itu memiliki arus yang berbeda namun bila hubungan regulasi dan partisipan berjalan dengan baik maka setiap pembangunan desa dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang muncul karena pada dasarnya mereka akan dapat saling menjaga antara regulasi dan partisipan.

Diskusi Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi terus dijalankan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat desa yang ada di negara Indonesia. Masyarakat desa menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan yang ada, untuk dapat memberikan dampak yang baik bagi di setiap penjuru desa di Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat merupakan partner terbaik dalam pembangunan yang ada maka dengan itu pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pembangunan. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Nursetiawan, 2018) yakni Strategi pengembangan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberlimpahan SDA tanpa adanya dukungan dari kualitas SDM akan menimbulkan ketimpangan dalam proses menemukan kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dukungan pemerintah merupakan faktor pendorong untuk dapat potensi-potensi yang ada untuk mendukung pembangunan desa, hal itu menjadi hal yang baik bagi masyarakat karena dengan dukungan pemerintah yang besar menjadikan pembangunan desa yang berkualitas. Pada akhirnya, bila partisipasi masyarakat tidak besar dalam pembangunan maka hanya menimbulkan rasa percuma karena itu sama saja membuang semua SDA yang menjadi potensi dengan cara percuma maka dengan itu partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu pembangunan desa agar menghasilkan tujuan dari pembangunan serta menjadikan SDA yang terpakai pada pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat desa sendiri di negara Indonesia adanya potensi energi terbarukan yang menurut banyaknya data ada sebanyak 300.000 mega watt, namun hanya digunakan sebanyak 3% padahal potensi energi itu sangat dekat dengan desa-desa yang ada di Indonesia sehingga mampu menciptakan potensi inovasi energi bagi setiap desa. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Soleh, 2017) Potensi desa diperoleh dari daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korelasi antara birokrasi dan partisipasi dapat dikatakan kuat karena untuk mencegah adanya kendala yang ada pada pembangunan desa seperti korelasi antara birokrasi dan regulasi yang dimana merupakan cara untuk menekan adanya tantangan yang muncul pada proses pembangunan desa. Korelasi antara budaya dan partisipasi sangat tidak kuat karena adanya faktor yang menjadikan partisipasi yang tidak menggenggam budaya tidak erat karena pada dasarnya pembangunan ini terjadi untuk

mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru dengan lebih mudah dan praktis sehingga budaya yang sudah tertanam lama akan memudar seiringnya waktu, hal itu menjadi tantangan pemerintah untuk tidak membuat masyarakat melupakan kebudayaan dan tetap merasakan kebiasaan yang baru.

Dengan adanya kerja yang dilakukan beberapa pihak dalam meningkatkan pembangunan inovasi desa menjadikan pembangunan desa-desa menjadi lebih merata yang dimana setiap desa di Indonesia merasakan perbandingan peningkatan pada setiap aspek bidang di pedesaan. Pemerintah harus mampu mendorong masyarakat untuk dapat lebih menciptakan inovasi-inovasi yang ada untuk kemajuan desa, dengan adanya pembaruan program maupun terciptanya pedoman yang baru akan mampu membuat setiap celah di setiap bidang untuk dapat lebih maju. Desa menjadi hal yang harus mampu diperhatikan karena pada dasarnya desa merupakan lingkungan yang paling dekat dari masyarakat sehingga begitu dengan adanya pembangunan desa menjadikan adanya potensi untuk dapat mengembangkan masyarakat-masyarakat di Indonesia.

Dalam pembangunan desa tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang muncul dari berbagai pihak ataupun hal yang dimana menjadikan pembangunan desa menjadi tersendat bahkan gagal sekalipun. Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat bahkan banyak kasus yang menentang pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal yaitu: (1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan bukan menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan. (2) Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. (3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. (4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan (Mondong, 2013). Kegagalan yang ada menjadikan acuan untuk dapat terus meningkatkan pembangunan desa dengan demikian pembangunan akan terus berkembang serta tidak akan mengulang kembali kesalahan yang sama walaupun masih dapat dilihat dalam beberapa program pembangunan masih mengulang kesalahan yang sama sehingga terbengkalainya program pembangunan tersebut.

Pembangunan inovasi desa memerlukan kerja sama antara para partisipasi untuk dapat membuat pembangunan desa dapat berjalan dengan baik terutama pada pihak pemerintah dan pihak masyarakat yang dimana memiliki kepentingan dan keinginan yang terkadang berbeda sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Namun, begitu pembangunan desa di negara Indonesia tetap berjalan sampai selesai walaupun dalam proses berjalannya adanya kendala yang memakan waktu lama dalam merampungkan tetapi setiap kendala yang ada dapat diselesaikan dengan baik pada setiap pihak. Pembangunan inovasi desa menjadi cara untuk dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat desa serta desa itu sendiri maka dengan itu pembangunan desa sering disebut sebagai cara untuk dapat meningkatkan mutu setiap wilayah atau daerah yang ada di negara Indonesia. Dalam pembangunan desa perlunya kerja sama yang baik bagi setiap aktor yang terlibat untuk melahirkan inovasi serta infrastruktur yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terlibat maupun yang tidak.

Pembangunan desa diharapkan dapat berjalan dengan baik demi kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Penutup

Strategi terus dijalankan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat desa yang ada di negara Indonesia. Masyarakat desa menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan yang ada untuk dapat memberikan dampak yang baik bagi di setiap penjuru desa di Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat merupakan partner terbaik dalam pembangunan yang ada maka dengan itu pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pembangunan. Dukungan pemerintah merupakan faktor pendorong untuk dapat potensi-potensi yang ada untuk mendukung pembangunan desa, hal itu menjadi hal yang baik bagi masyarakat karena dengan dukungan pemerintah yang besar menjadikan pembangunan desa yang berkualitas.

Pada akhirnya, bila partisipasi masyarakat tidak besar dalam pembangunan maka hanya menimbulkan rasa percuma karena itu sama saja membuang semua SDA yang menjadi potensi dengan cara percuma maka dengan itu partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu pembangunan desa agar menghasilkan tujuan dari pembangunan serta menjadikan SDA yang terpakai pada pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat desa sendiri di negara Indonesia adanya potensi energi terbarukan yang menurut banyaknya data ada sebanyak 300.000 mega watt, namun hanya digunakan sebanyak 3% padahal potensi energi itu sangat dekat dengan desa-desa yang ada di Indonesia sehingga mampu menciptakan potensi inovasi energi bagi setiap desa. Keterbatasan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh hanya berasal dari dokumen-dokumen terkait Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah perlu adanya objek daerah tertentu guna mengetahui Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa.

Daftar Pustaka

- ARIANTO, J. (2017). Ngo Atau Lsm Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia. *Jurnal PPKn & Hukum*, 12(2), 1–15. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/4688>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Community Participation in Village Development Planning Deliberation*. 3(September), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Henriyani, E. (2019). *Program Inovasi Desa; Antara Peluang Dan Tantangan*. 66–70.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1), 1–18.

- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- UU No.06 Tahun 2014, (2014).
- Roza, D. & L. A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 607–624.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Ulfah, I. F., Setiawan, A., & Rahmawati, A. (2017). Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8486>
- Zakiah, U., & Idrus, I. A. (2017). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.24905/jip.2.2.2017.84-95>